



RENJA PERUBAHAN

(RENCANA KERJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB

TAHUN 2025



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dapat disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Renja Perubahan ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan kondisi aktual pembangunan daerah, baik yang bersumber dari perubahan arah kebijakan nasional dan daerah, perubahan alokasi anggaran, maupun tuntutan kebutuhan masyarakat yang berkembang secara cepat. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2025–2029 dan mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah dalam urusan wajib non-pelayanan dasar, DPPKB berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta penurunan angka stunting dan pernikahan usia anak.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, mitra kerja, maupun masyarakat. Harapan kami, Renja Perubahan ini dapat menjadi panduan yang operasional, efektif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan yang ada.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya mewujudkan masyarakat Sidenreng Rappang yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing melalui pembangunan keluarga yang tangguh dan mandiri.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

SYAHRUL MUBARAK, SKM, M.Amd.KP

Nip. 19810802 200604 1 015

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang | 2 |
| 1.3 Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.4 Maksud Dan Tujuan | 3 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .. | 6 |
| 2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 | 6 |
| 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB | 14 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 15 |
| BAB IV PENUTUP | 25 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah | 7 |
| 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 | 16 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Tahun 2025 DPPKB Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tetap relevan, realistis, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, perubahan Renja menjadi instrumen penting dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perubahan pada RKPD yang menyangkut penyesuaian kebijakan pembangunan, prioritas sasaran daerah, serta alokasi anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen Renja agar tetap sinkron dan relevan.

Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2025 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena PERUBAHAN RENJA

menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana dan program, PERUBAHAN RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat.

1.2 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah Terpilih Kab.Sidenreng Rappang Terkait Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi : Kabupaten Sidenreng Rappang Maju dan Sejahterah.

Misi : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul dan Kesehatan Untuk Semua.

Arah Kebijakan : Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Program Penguatan Ketahanan Keluarga

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Sedangkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk melaksanakan penganggaran secara efektif, efisien dan terukur.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**, mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum**, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan**, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable

Development Goals), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV P E N U T U P,

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 – 2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL II.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan)

Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan I Tahun 2025 | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|---|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9=5+7 | 10=(9/4*100) |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | |
| 2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah | 300 Persen | 46 Persen | 100 | | | | |
| 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 300 Persen | 0 | 100 | 0 | | | |
| 2.14.01.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4 Dokumen | 0 | 4 | 0 | 0 | | |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 0 | 100 | | | | |
| 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 720 Orang/Bulan | 0 | 360 Orang/Bulan | 27 | 6,67 | 27 | 3,75 |
| 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | 51 Persen | 100 | | | | |
| 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan | 25 Paket | 1 | 12 Paket | 1 paket | 8,33 | 2 | 8 |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 24 Laporan | 0 | 12 Laporan | 3 Laporan | 25 | 1 | 4,17 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|---|-------|
| 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | - | 100 | 0 | 0 | | |
| 2.14.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan | 1 Unit | 0 | 1 Unit | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 | | | | |
| 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan | 13 Laporan | 0 | 12 Laporan | 3 Laporan | 25 | 3 | 23,08 |
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Umum pelayanan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan | 25 Laporan | 1 Laporan | 12 Laporan | 3 Laporan | 25 | 4 | 16 |
| 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 Persen | - | 100 Persen | | 50 Persen | | |
| 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 0 | 4 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara | 8 Unit | 0 | 4 Unit | 2 Unit | 50 | 2 | 25 |
| 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas | 2 Unit | 0 | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.01.2.09.0011 | Pemerlihaaran/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas | 1 unit | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun | 100 Persen | 85 Persen | 21.3 Persen | | | | |
| 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan OPD Yang Terlibat Dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (%) | 100 Persen | 61 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------|---|-------|
| 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)" | 22 Satuan Pendidikan | 0 | 11 Satuan Pendidikan | 2 Satuan Pendidikan | 18,18 | 2 | 9,09 |
| 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan) | 3 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 0 | 0 | 1 | 33,33 |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten | 100 Persen | 94 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA) | 2 Laporan | - | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 | 33,33 |
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia | 23 Laporan | 1 Laporan | 11 Laporan | 3 Laporan | 27,27 | 4 | 17,39 |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia | 23 Dokumen | 1 Laporan | 11 Laporan | 3 Laporan | 27,27 | 4 | 17,39 |
| 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)" | 1 Unit/Rumah Data | - | 1 Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.02.2.02.0016 | Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ditingkat kabupaten/kota | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)" | 22 Laporan | 0 | 11 Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana (Laporan)" | 22 Laporan | 0 | 11 Laporan | 2 Laporan | 18,18 | 2 | 9,09 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------|-----------|------|---|-------|
| 2.14.02.2.02.0019 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)" | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 | 0 | 1 | 33,33 |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB) | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR) | 100 Persen | 69 Persen | 55.9 Persen | | | | |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Loka | 100 Persen | 79 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | 23 Laporan | 1 Laporan | 11 Laporan | 3 Laporan | 0,27 | 4 | 17,39 |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan) | 22 Laporan | 0 | 11 Laporan | 3 Laporan | 0,27 | 3 | 13,64 |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 3 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | 1 | 33,33 |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | 23 Organisasi | 1 Organisasi | 11 Organisasi | 0 | 0 | 1 | 4,35 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------|-----------|------|-----|-------|
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | 318 Orang | 106 Orang | 106 Orang | 26 | 0,25 | 132 | 41,51 |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Melaksanakan Pembinaan IMP Dan Program KKBPK (%)” | 100 Persen | 93 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 25 Laporan | 1 Laporan | 12 Laporan | 2 Laporan | 0,17 | 3 | 12 |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | 5982 Orang | 45 Orang | 4608 Orang | 295 Orang | 0,22 | 340 | 5,68 |
| 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 2 Laporan | 1 Laporan | - | - | - | 1 | 50 |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 13 Laporan | 1 Laporan | 6 Laporan | 2 Laporan | 0,33 | 3 | 23,08 |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB | Cakupan Kader Yang Ikut Dalam Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Berkb (%)” | 100 Persen | 23 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | 1 | 100 |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | 176 Unit/Kampung KB | 50 Kampung KB | 63 Unit | 15 Unit | 0,24 | 65 | 36,93 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|------|----|-------|
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 100 Kampung/Desa | 50 Kampung KB | 25 Kampung | 7 Kampung | 0,28 | 57 | 57 |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) | Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR) | 100 Persen | 92 Persen | 36.5 persen | | | | |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)" | 100 Persen | 78 Persen | 100 persen | | | | |
| 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan) | 2 Laporan | 0 | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 | 1 | 50 |
| 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) (Laporan / Dokumen) | 22 Laporan / Dokumen | 0 | 11 Laporan/ Dokumen | 1 Laporan/ Dokumen | 0,09 | 1 | 4,55 |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosidan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | 402 Laporan | 0 | 2 Laporan | 1 Laporan | 0,50 | 1 | 0,25 |
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 40 Unit | 20 Unit | 11 Unit | 1 Unit | 0,09 | 21 | 52,50 |
| 2.14.04.2.01.0025 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) | 22 Laporan | 0 | 11 Laporan | 1 Laporan | 0,09 | 1 | 4,55 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|-----------|-------|----|-------|
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan kelompok masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan pembinaanketahanan dan kesejahteraan keluarga | 100 Persen | 96 Persen | 100 Persen | | | | |
| 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks) (Organisasi) | 52 Organisasi | 0 | 26 Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita | 33 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan | 2 Laporan | 18,18 | 13 | 39,39 |
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan | 33 Laporan | 11 Laporan | 11 Laporan | 2 Laporan | 18,18 | 13 | 39,39 |

Pangkajene Sidenreng, 16 April 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SYAHRUL MUBARAK,SKM,M.Adm.KP

Pangkat : IV/a

Nip : 19810802 200604 1 015

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

| No. | Isu Strategis | Uraian Permasalahan |
|-----|---|--|
| 1 | Tingkat Kelahiran yang Masih Relatif Tinggi | Angka kelahiran di beberapa kecamatan belum terkendali akibat masih rendahnya kesadaran dan akses terhadap pelayanan KB. |
| 2 | Ketimpangan Akses Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi | Wilayah terpencil dan perdesaan masih memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga penyuluh KB, menyebabkan kesenjangan layanan. |
| 3 | Rendahnya Partisipasi Pria dalam Program KB | Budaya patriarki dan kurangnya edukasi menyebabkan rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program KB. |
| 4 | Rendahnya Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perencanaan | Masih terbatasnya integrasi data antara instansi dan belum optimalnya pemanfaatan data SIGA (Sistem Informasi Keluarga). |
| 5 | Perkawinan Usia Anak yang Masih Tinggi | Tingginya angka perkawinan usia anak berdampak pada kesehatan ibu dan anak serta menambah beban demografi. |
| 6 | Masih Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi | Terutama di wilayah tertentu yang kurang terjangkau pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. |
| 7 | Belum Optimalnya Pemberdayaan Keluarga melalui BKB, BKR, BKL dan UPPKA | Kurangnya pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok serta minimnya partisipasi masyarakat. |
| 8 | Perubahan Struktur dan Bonus Demografi | Bonus demografi belum diimbangi dengan kualitas SDM yang siap kerja dan produktif, serta belum termanfaatkan secara optimal. |
| 9 | Masih Terbatasnya Anggaran dan Sumber Daya | Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat dijalankan secara maksimal. |
| 10 | Kurangnya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Program DPPKB | Digitalisasi program masih minim, terutama dalam edukasi dan penyuluhan berbasis media sosial atau aplikasi digital. |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

TABEL III.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Sidenreng Rappang

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | | SETELAH PERUBAHAN | | | |
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok Pemnerima Manfaat | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Kelompok Pemnerima Manfaat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | Rp7.557.069.000,00 | | | | Rp 7.478.235.000,00 | |
| 2.14.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp3.111.878.800,00 | | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp 2.756.476.300,00 | |
| 2.14.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp38.300.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 0 Persen | Rp - | |
| 2.14.01.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Pangkajene Sidenreng | 4 Dokumen | Rp38.300.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 0 | Rp - | |
| 2.14.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp2.216.157.100,00 | | Pangkajene Sidenreng | | Rp 2.216.157.100,00 | |
| 2.14.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Pangkajene Sidenreng | 30 Orang/ Bulan | Rp 2.216.157.100,00 | | Pangkajene Sidenreng | 30 Orang/Bulan | Rp 2.216.157.100,00 | |
| 2.14.01.2.06 | Administrasi Umum Prangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp513.076.700,00 | | Pangkajene Sidenreng | | Rp 231.781.800,00 | |
| 2.14.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan | Pangkajene Sidenreng | 2 Paket | Rp367.154.700,00 | | Pangkajene Sidenreng | 12 Paket | Rp 181.812.800,00 | |
| 2.14.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Pangkajene Sidenreng | 1 Laporan | Rp145.922.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 12 Laporan | Rp 49.969.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------------------|------------|--------------------------|--|
| 2.14.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp41.330.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | | Rp - | |
| 2.14.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Sediakan | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | Rp41.330.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 0 | Rp - | |
| 2.14.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp148.000.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | | Rp 148.000.000,00 | |
| 2.14.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di Sediakan | Pangkajene Sidenreng | 1 Laporan | Rp100.000.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 12 Laporan | Rp 100.000.000,00 | |
| 2.14.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Umum pelayanan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan | Pangkajene Sidenreng | 12 Laporan | Rp48.000.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 12 Laporan | Rp 48.000.000,00 | |
| 2.14.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Pangkajene Sidenreng | 100 Persen | Rp155.015.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | | Rp 160.537.400,00 | |
| 2.14.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Pangkajene Sidenreng | - | Rp40.000.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 4 Unit | Rp 54.430.400,00 | |
| 2.14.01.2.09.0006 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di Pelihara | Pangkajene Sidenreng | 5 Unit | Rp15.015.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 4 Unit | Rp 840.000,00 | |
| 2.14.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas | Pangkajene Sidenreng | - | Rp0,00 | | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | Rp 105.267.000,00 | |
| 2.14.01.2.09.0011 | Pemerlihaan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitas | Pangkajene Sidenreng | 1 Unit | Rp100.000.000,00 | | Pangkajene Sidenreng | 0 | Rp - | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------|---------------------|------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|--|
| 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun | Kab. Sidrap | 21,3 | Rp337.177.000,00 | | Kab. Sidrap | 21,3 | Rp 337.256.800,00 | |
| 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Cakupan OPD Yang Terlibat Dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (%) | Kab. Sidrap | | Rp40.640.500,00 | | Kab. Sidrap | | Rp 46.576.100,00 | |
| 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)" | Kab. Sidrap | 1 Satuan Pendidikan | Rp12.115.500,00 | | Kab. Sidrap | 1 Satuan Pendidikan | Rp 18.051.100,00 | |
| 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)" | Kab. Sidrap | 10 Kegiatan | Rp28.525.000,00 | | Kab. Sidrap | 10 Kegiatan | Rp 28.525.000,00 | |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten | Kab. Sidrap | | Rp296.536.500,00 | | Kab. Sidrap | | Rp 290.680.700,00 | |
| 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp62.022.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp 62.022.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga | Kab. Sidrap | - | Rp0,00 | | Kab. Sidrap | 1 Dokumen | Rp 6.385.700,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|-------------|---------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|--|
| 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp65.200.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp 65.200.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia | Kab. Sidrap | 1 Dokumen | Rp132.000.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Dokumen | Rp 132.000.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)" | Kab. Sidrap | 1 Unit | Rp1.170.000,00 | | Kab. Sidrap | - | Rp - | |
| 2.14.02.2.02.0016 | Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ditingkat kabupaten/kota | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)" | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp16.782.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp 3.870.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatandan Pelaporan Program Bangga Kencana | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)" | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp19.362.500,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp 14.100.000,00 | |
| 2.14.02.2.02.0019 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)" | Kab. Sidrap | - | Rp0,00 | | Kab. Sidrap | 1 Dokumen | Rp 7.103.000,00 | |
| 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB) | Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR) | Kab. Sidrap | 55,9 | Rp2.197.233.000,00 | | Kab. Sidrap | 55,9 | Rp2.197.233.000,00 | |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Loka | Kab. Sidrap | | Rp889.850.000,00 | | Kab. Sidrap | | Rp889.850.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|--|
| 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp537.900.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp537.900.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp132.000.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp132.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | Kab. Sidrap | 1 Dokumen | Rp120.000.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Dokumen | Rp120.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi) | Kab. Sidrap | 1 Organisasi | Rp99.950.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Organisasi | Rp99.950.000,00 | |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK | Kab. Sidrap | | Rp265.000.000,00 | | Kab. Sidrap | | Rp265.000.000,00 | |
| 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang) | Kab. Sidrap | 106 Desa/ Orang | Rp265.000.000,00 | | Kab. Sidrap | 106 Desa/ Orang | Rp265.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|------------|-------------------------|--|--------------------|------------|--------------------------|--|
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Melaksanakan Pembinaan IMP Dan Program KKBPK (%)" | Kab. Sidrap | | Rp550.758.000,00 | | Kab. Sidrap | | Rp550.758.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp17.100.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp17.100.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) | Kab. Sidrap | 1329 Orang | Rp511.608.000,00 | | Kab. Sidrap | 1329 Orang | Rp511.608.000,00 | |
| 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp22.050.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp22.050.000,00 | |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB | Cakupan Kader Yang Ikut Dalam Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Berkb (%)" | Kab. Sidrap | | Rp491.625.000,00 | | Kab. Sidrap | | Rp 491.625.000,00 | |
| 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit) | Kab. Sidrap | 1 Unit | Rp346.500.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Unit | Rp 346.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | Kab. Sidrap | 106 Kampung | Rp145.125.000,00 | | Kab. Sidrap | 106 Kampung | Rp 145.125.000,00 | |
| 2.14.04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS) | Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR) | Kab. Sidrap | 36,5 | Rp1.910.780.200,00 | | Kab. Sidrap | 36,5 | Rp 2.187.268.900,00 | |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)" | Kab. Sidrap | | Rp249.907.900,00 | | Kab. Sidrap | | Rp 531.568.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp11.303.900,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp 21.510.500,00 | |
| 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera(PPKS) (Laporan / Dokumen) | Kab. Sidrap | 1 Laporan/ Dokumen | Rp86.220.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan/ Dokumen | Rp86.220.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosidan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan) | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp31.048.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp318.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------|--|
| 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | Kab. Sidrap | 1 Unit | Rp110.336.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Unit | Rp 100.000.000,00 | |
| 2.14.04.2.01.0025 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan) | Kab. Sidrap | 11 Laporan | Rp11.000.000,00 | | Kab. Sidrap | 11 Laporan | Rp 5.837.500,00 | |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaanketahanan dan kesejahteraan keluarga | Kab. Sidrap | | Rp1.660.872.300,00 | | Kab. Sidrap | | Rp 1.655.700.900,00 | |
| 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi) | Kab. Sidrap | 1 Organisasi | Rp30.672.300,00 | | Kab. Sidrap | 1 Organisasi | Rp 25.500.900,00 | |
| 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp741.000.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp 741.000.000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------|-----------|------------------|--|-------------|-----------|------------------|--|
| 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp889.200.000,00 | | Kab. Sidrap | 1 Laporan | Rp889.200.000,00 | |
|-------------------|--|---|-------------|-----------|------------------|--|-------------|-----------|------------------|--|

Pangkajene Sidenreng, 16 April 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SYAHRUL MUBARAK,SKM.M.Adm.KP

Pangkat : IV/a

Nip : 19810802 200604 1 015

BAB IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat menjadi arahan bagi seluruh jajaran Unit Kerja yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kinerja Dinas.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan, maka perlu dirumus kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.
2. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2025 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil (*outcome*) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 16 April 2025

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

SYAHRUL MUBARAK, SKM.M.Amd.KP

Pangkat : Pembina/IV.a

Nip : 19810802 200604 1 015